

KAJIAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KOTA TARAKAN

Oleh : Midiansyah

Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman

ABSTRACT

The purpose of the study was to identify and determine : (1) the amount of fund allocation , the total value , kind and type of aid that has been disbursed, kind and type of target groups that have received assistance through the Grant Assistance Fund and Social Assistance in Tarakan, (2) common problems and rise's obstacles, (3) the factors that drives the implementation of activities / programs, (4) community activities / programs : (5) the succession level of the allocation use, and (6) develop management strategies that effective and efficient to use Grant Aid Allocation and Social Assistance in the City of Tarakan.

The experiment was conducted from March to August 2011 in Tarakan. This research study took place in 4 (four) districts in Tarakan include East Tarakan, Middle Tarakan, West and North Tarakan districts, which has been getting running Allocation.

Preparatory activities undertaken to complete the initial phase of the administration and coordination of inter-agency cooperation, an inventory of the tools and materials are needed, stabilization of work's programs, observation, collection data and analysis data. Primary data were obtained through direct observation and interviews with sources and secondary data obtained from various departments /agencies in the form of literature, study reports and annual reports are relevant to the study.

Compilation of data is the selection of the data and information obtained are then grouped according to the analysis needs to be performed. After the compilation stage is done, followed by a descriptive analysis and interpretation of the results carried out the analysis. In addition, decision-making is done by using the scoring.

The results showed that :

- 1. The amount of budget that allocated for Grants and Bansos Tarakan City in year 2010 is Rp.185.420.879.657,84 with the realization of the budget that can be absorbed by Rp. 152.,384.512.199,84 , - or 82.18 % , and the rest of the budget that is not absorbed is Rp. 33.036.367.158,00, - or a total of 17.82 % from the total budget. The budget allocation is used to buying subsidies at Local Company (Perusda); Allocation of Funds for the Central Government Institutions (Vertical) in Regional, Allocation of Funds for Agency / Private Organizations ; Budget Allocation for Community Group / Individual; Budget Allocation for Social Assistance Organization; The allocation of political party assistance; Unexpected Expenditure allocation and allocation of Local Government Finance.*

2. *Target groups that obtain grants and Bansos funds : Vertical existing institutions in the Region; Agency/Institution/Organization Private; Community Group/Individual; Social Organization; Help Political Party (political party); Variable Expenses.*
3. *Factors to be problems and obstacles are : (a) the funds are not fully absorbed by the public, (b) the administration's proposal is still considered as too complicated; (c) Human Resources of respondents still relatively limited, and (d) regulations/guidelines are always changing; (e) technically planning's activities program does not exist and the location of the development is not clear/overlapping/related legal issues; (f) expenditure accounts often do not conform with the RKB/RAB proposal; (g) disappointment and a sense of not community is proud of the distribution of funds is still high; (h) the provision of grants and Bansos are not in accordance with procedure, generally have not been given strict sanctions and (j) the report's indication made by organizations or community groups and individuals are fictional.*
4. *Factors that drives the implementation and management of Social Aid Grants, that are : (a) trend and Social Aid Grant Aid for 3 (three) years continues to increase, (b) Grant funds and Bansos still very much needed by the community respondents, (c) City community level is still high vulnerability, especially to cope with emergencies and unexpected disasters, (d) a reference priority measures management has become a common awareness of the Grants and Bansos, in order to build community self-reliance.*
5. *The level of public perception of the management of grant funds and Bansos in each district following as North Tarakan 71.21% and East Tarakan 71.30%, Central Tarakan 79.17% and West Tarakan 68.33%. Indicators of public perceptions of respondents towards the management of grants and Bansos by 72.34% classified as optimal and only 27.66% classified as not optimal.*
6. *The level of achievement of the successful management of grant funds and Bansos, obtained the total benefit of the achievement indicators in each of the districts are : North Tarakan 53.05%, East Tarakan 51.91%, Central Tarakan 67.66% and West Tarakan 54.33%. Indicators of the achievement of the total benefit of 56.97% classified as optimal and only 43.03% classified as not optimal.*

Keywords : grants and social assistance, city of Tarakan

I. PENDAHULUAN

Bergulirnya otonomi daerah telah berjalan sejak Januari tahun 2001, dalam beberapa hal, otonomi daerah yang dilegalkan dengan UU Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah, telah menjadi tonggak baru dalam tradisi pemerintahan di Republik ini. Kemudian untuk mempertegas pelaksanaan otonomi daerah agar tidak terjadi penguasaan yang berlebihan, maka lahirlah UU Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor. 33 tentang Keuangan Daerah sebagai revisi UU sebelumnya, agar pelaksanaan otonomi dapat memberikan kemanfaatan yang positif bagi masyarakat di daerah-daerah.

Pelaksanaan pemerintahan daerah yang otonom menghendaki adanya pengelolaan keuangan secara otonom pula. Pengelolaan keuangan yang otonom seharusnya dapat memberikan pelajaran kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengalokasian dana secara benar dan bertanggungjawab. Ada kekhawatiran dalam pengalokasian terutama dana yang bersifat stimulan, dapat terjadi pengeluaran yang fiktif atau dapat dimanfaatkan kelompok kepentingan tertentu untuk mendapat dukungan (seperti Parpol dan Ormas Tertentu), sehingga dana yang tadinya dipersiapkan untuk mengatasi permasalahan kemasyarakatan dan memacu pembangunan di daerah, justru menjadi tidak tepat sasaran.

Hal ini dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, agar keuangan daerah dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan-perundangan, efisien dan efektif, terbuka dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat. Demikian pula dengan pengelolaan keuangan untuk Dana Bantuan Hibah yang berasal dari APBN/APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota juga menghendaki pengelolaan yang sama dan harus benar-benar memberikan kemanfaatan bagi masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang memperolehnya, dan jangan sampai terjadi penggunaan dana yang fiktif dan tidak tepat sasaran, sehingga nantinya sangat merugikan terhadap pengelolaan keuangan negara dan terjadinya pemborosan, yang seharusnya dihindari, karena kalau itu terjadi justru masyarakat kita juga yang akan rugi.

Sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor. 900/2677/SJ/2007) tanggal 8 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah yang dimaksud dengan Dana Bantuan Sosial (Bansos) adalah alokasi dana dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat dan bersifat stimulan. Sedangkan Dana Hibah adalah

alokasi dana dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah daerah lainnya, perusda, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Kegiatan Bansos/Hibah adalah kegiatan/program yang diusulkan dan telah mendapat dana bantuan sosial (Bansos)/Hibah. Untuk mendapatkan dana bantuan sosial (Bansos) dan Hibah masyarakat atau lembaga kemasyarakatan harus mengajukan usulan proposal terhadap program/kegiatan yang ingin dilakukan. Proposal yang masuk, kemudian akan dilakukan seleksi oleh tim penilai independen dan tim seleksi.

Tujuan pemberian bantuan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat termasuk mendukung kelestarian lingkungan hidup dan penguatan kelembagaan masyarakat. Sedangkan Tujuan pemberian Hibah adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Sifat bantuan sosial dan bantuan hibah adalah sebagai berikut : (1) Stimulan bagi program dan kegiatan pemerintah daerah; (2) diutamakan untuk untuk program/kegiatan yang umumnya sulit untuk dilaksanakan secara efektif oleh SKPD pemerintah daerah; (3). diberikan secara selektif; (4) tidak mengikat atau tidak terus menerus, dalam arti bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran; (5) penganggarannya memperhatikan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah berhak untuk melakukan audit keuangan kepada setiap penerima bantuan hibah dan bantuan sosial dengan tujuan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan uang negara. Badan Pengawas Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah maupun oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Pemerintah. Apabila jumlah penerima bantuan terlalu banyak sehingga tidak mungkin melakukan audit pada seluruh penerima, maka audit keuangan harus dilakukan paling sedikit kepada 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan penerima bantuan yang telah mengirimkan laporan realisasi anggaran yang dipilih secara acak pada setiap wilayah kabupaten/kota. Seluruh organisasi penyalur bantuan harus diaudit. Organisasi penerima bantuan yang terpilih untuk diaudit juga terpilih untuk dievaluasi pencapaian hasilnya.

Evaluasi pencapaian hasil, dilakukan dengan cara memeriksa kebenaran atas laporan pencapaian hasil dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Evaluasi dilakukan oleh Biro/Bagian

dan Tim Independen. Apabila hasil audit menunjukkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan sejumlah uang negara maka organisasi penerima harus mengembalikan uang tersebut dan disetorkan ke kas daerah. Apabila organisasi penerima menolak mengembalikan uang maka Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya penuntutan secara hukum ke pengadilan.

Dengan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab, diharapkan alokasi dana yang dianggarkan untuk menunjang pembangunan kemasyarakatan, khususnya dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Hibah dapat dimanfaatkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan secara optimal dan dapat memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan studi tentang "Kajian Evaluasi Pemanfaatan Dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Kota Tarakan".

Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan mengetahui : (1) besaran Alokasi Dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang dikucurkan Pemerintah Kota Tarakan; (2) jumlah, macam dan jenis bantuan yang telah disalurkan, melalui Dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Tarakan; (3) jumlah, macam dan jenis kelompok sasaran yang telah menerima bantuan, melalui Dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Tarakan; (4) permasalahan-permasalahan umum dan kendala-kendala yang muncul akibat adanya (pengusulan, persetujuan, pencairan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi) Alokasi Dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Tarakan; (5) faktor-faktor yang menjadi pendorong terlaksananya Kegiatan/Program akibat adanya (pengusulan, persetujuan, pencairan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi) Alokasi Dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Tarakan (6) persepsi masyarakat terhadap kegiatan/program yang dilakukan akibat adanya (pengusulan, persetujuan, pencairan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi) pemanfaatan Dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Tarakan; (7) tingkat pencapaian keberhasilan penggunaan Alokasi Dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Tarakan; dan (8) menyusun strategi pengelolaan yang efektif dan efisien terhadap penggunaan Alokasi Dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Tarakan

II. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi

Penelitian dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan Agustus 2011 di Kota Tarakan. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di 4 (empat) kecamatan di Kota Tarakan mencakup

kecamatan (Tarakan Timur, Tarakan Tengah, Tarakan Barat dan Tarakan Utara) yang selama ini telah mendapatkan kucuran Alokasi.

B. Kegiatan Penelitian

Kegiatan persiapan dilakukan untuk menyelesaikan tahap awal kegiatan administrasi dan koordinasi kerjasama antar lembaga, inventarisasi alat dan bahan yang dibutuhkan, pemantapan program kerja, observasi, pengumpulan data dan analisis data.

C. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah : (1) data primer diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dengan narasumber, baik secara individual maupun kolektif pada tiap-tiap kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Tarakan. Kegiatan wawancara dilakukan kepada para narasumber terkait, yaitu aparatur mencakup (Kota, Kecamatan dan Kelurahan); dan masyarakat penerima dana bantuan hibah dan bantuan sosial mencakup (Pengurus Yayasan, Pengurus PMI, Pengurus KONI, Pimpinan Perusda, Ketua Badan Hukum Pendidikan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Parpol, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita dan masyarakat lainnya) serta pemerhati kebijakan publik mencakup (LSM, Universitas dan pemerhati pembangunan masyarakat); dan (2) data sekunder diperoleh dari berbagai dinas/instansi terkait berupa literatur, laporan hasil studi dan laporan tahunan yang ada relevansinya dengan studi yang dilakukan.

D. Kompilasi dan Analisa Data

Kompilasi data adalah seleksi terhadap data dan informasi yang diperoleh yang kemudian di kelompokkan sesuai dengan kebutuhan analisis yang akan dilakukan. Setelah tahap kompilasi dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan analisis secara deskriptif dan dilakukan interpretasi terhadap hasil analisis tersebut. Selain itu, dilakukan pengambilan keputusan dengan menggunakan skoring. Skor dan pengambilan keputusan berdasarkan indikatornya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Skor dan Pengambilan Keputusan Berdasarkan Indikatornya

No	Indikator	Skor	Pengambilan Keputusan
1	Persyaratan Pengusulan	1-2	1 = Tidak Dilakukan
			2 = Dilakukan
2	Persyaratan Persetujuan	1-2	1 = Tidak Dilakukan
			2 = Dilakukan
3	Persyaratan Pencairan	1-2	1 = Tidak Dilakukan
			2 = Dilakukan
4	Pelaksanaan Teknis	1-2	1 = Tidak Dilakukan

No	Indikator	Skor	Pengambilan Keputusan
			2 = Dilakukan
5	Pelaksanaan Monitoring	1-2	1 = Tidak Dilakukan
			2 = Dilakukan
6	Pelaksanaan Evaluasi	1-2	1 = Tidak Dilakukan
			2 = Dilakukan
7	Persepsi Masyarakat	1-2	1 = Tidak Dilakukan
			2 = Dilakukan
8	Total Kemanfaatan	1-7	1 – 7 = Tdk Optimal
			8 – 14 = Sgt Optimal

Keterangan :

- Total Kemanfaatan Anggaran = Penjumlahan skoring (Persyaratan Pengusulan + Persyaratan Persetujuan + Persyaratan Pencairan + Persyaratan Teknis + Persyaratan Monitoring + Persyaratan Evaluasi + Persepsi Masyarakat)
- Kemanfaatan menunjukkan penggunaan Alokasi Dana Bantuan Sosial dan Dana Hibah berjalan sesuai dengan prosedur dan harapan masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari informasi data sebelumnya yang diperoleh baik dari data primer dan data sekunder maupun identifikasi beberapa indikator penentu serta kajian deskriptifnya didapatkan beberapa item yang menjadi tujuan penelitian, antara lain :

A. Anggaran yang Dialokasikan

Besaran anggaran yang dialokasikan untuk Dana Hibah dan Bansos Kota Tarakan 2010, adalah sebesar Rp.185.420.879.657,84 dengan realisasi anggaran yang dapat terserap sebesar Rp. 152.384.512.199,84,- atau 82,18 %, dan sisa anggaran yang belum terserap adalah sebesar Rp 33.036.367.158,00,- atau sebesar 17,82 % dari total anggaran. Dengan rincian untuk masing-masing alokasi anggaran :

1. Belanja Subsidi pada Perusahaan Daerah (Perusda) sebesar Rp. 2.336.000.000,00,- atau 1,26 % dari Total Anggaran, dengan realisasi sebesar Rp. 1.852.760.814,00,- atau 1,22 % dari Total Anggaran Realisasi;
2. Alokasi Dana untuk Lembaga Pemerintah Pusat (Vertikal) di Daerah sebesar Rp. 9.227.700.000,00,- atau 4,97 % dari Total Anggaran dengan Realisasi sebesar Rp. 7.059.918.167,00,- atau 4,63 % dari Total Anggaran Realisasi;

3. Alokasi Dana untuk Badan/Organisasi Swasta sebesar Rp. 125.897.213.000,00 atau 73,03 % dari Total Anggaran, dengan realisasi sebesar Rp. 111.292.825.469,00,- atau 67,90 % dari Total Anggaran Realisasi;
4. Alokasi Anggaran untuk Kelompok Masyarakat/Perorangan sebesar Rp. 25.664.828.500,00,- atau 13,84 %, dari Total Anggaran, dengan realisasi sebesar Rp. 19.973.836.650,00,- atau 13,11 % dari Total Anggaran Realitas;
5. Alokasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp. 17.967.854.171,00,- atau 9,69 % dari Total Anggaran, dengan realisasi sebesar Rp 10.083.118.051,00,- atau 5,17 % dari total Anggaran Realisasi;
6. Alokasi Bantuan Parpol sebesar Rp. 580.436.536,00,- atau 0,31 %, dengan realisasi sebesar Rp. 580.436.536,00,- atau 0.38 % dari Total Anggaran Realisasi;
7. Alokasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 2.000.000.000,00,- atau 1,08 % dari Total Anggaran, dengan realisasi sebesar Rp 1.993.151.786,00,- atau 0,017 % dari total Anggaran Realisasi; dan
8. Alokasi Pembiayaan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.746.846.57,84,- atau 0,99 % dari Total Anggaran, dengan realisasi sebesar Rp. 1.746.846.957,84,- atau 2,44 % dari total Anggaran Realisasi.

Kemudian Besaran Dana Hibah dan Bansos yang disalurkan 3 (tiga) tahun terakhir :

1. Tahun 2008 sebesar Rp. 159.131.789.443,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 108.306.764.790,- atau 68,06 % dari Total Anggaran, dengan Sisa Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 50.825.024.653,- atau 31,94 % dari Total Anggaran.
2. Tahun 2009 alokasi dana Hibah dan Bansos sebesar Rp. 175.663.578.535,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 87.406.750.749,- atau 49,76 % dari Total Anggaran, dengan Sisa Anggaran yang tidak terserap Rp. 88.256.827.786,- atau 50,24 % dari Total Anggaran.
3. Tahun 2010 besaran dana Hibah dan Bansos yang dialokasikan sebesar Rp. 185.420.879.657,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 152.384.512.499,- atau 82,18 % dari Total Anggaran, dengan Sisa Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 33.036.367.158,- atau 17,82 % dari Total Anggaran

Kelompok sasaran yang menerima dana Bantuan Hibah dan Bansos adalah :

1. Alokasi dana Hibah untuk Instansi Vertikal di Daerah ditujukan kepada antara lain : SAR Nasional, Kantor Kodim dan Koramil, Batalyon Infanteri 613/Raja Alam, BPS Kota Tarakan, Detasemen Polisi Militer, Pangkalan TNI-AL, Komando Operasi TNI-AU, Radar Tarakan, RRI

Tarakan, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kantor Kementerian Agama, Pos Polair Tarakan, Lapas Kelas II Tarakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan. Pemberian Dana Hibah ini ditujukan untuk paket pembangunan, menunjang kegiatan dan operasional masing-masing instansi vertikal tersebut.

2. Alokasi dana Hibah untuk Badan/Lembaga/Organisasi Swasta yang ada di Kota Tarakan ditujukan kepada antara lain ; KONI Kota Tarakan, Lembaga Penyiaran Publik Kota Tarakan, Dana BOS & BOP di Lingkungan Dinas Pendidikan, Badan Narkotika, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ), Yayasan-yayasan, Pengurus Cabang Organisasi Massa, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, Pengurus Cabang Palang Merah, Tim Penggerak Pemberdayaan Perempuan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dewan Kesenian. Pengurus Wredatama Republik Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Korpri Kota Tarakan, Lembaga Adat Tidung, Yayasan Sekolah Luar Biasa Kasih Bahagia Tarakan, Panitia Pemotongan Hewan Qurban, Panti Asuhan Bhayangkari Tarakan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Darma Wanita, Pimpinan Cabang Organda, Universitas Borneo, BP-4, Pimpinan Cabang NU dan Muhammadiyah, Panitia Hari Besar Islam (PHBI), Kelompok Swadaya Masyarakat, Karang Taruna, Gerakan Bela Rakyat (Gebrak) Kota Tarakan, Kesbanglinmas, Kelompok Fardhu Kipayah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tarakan, DPD Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Ikatan Bidan Kota Tarakan, BOP Tingkat SD, SMTP, dan SMTA Kota Tarakan, Yayasan Pendidikan Islam, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Tarakan, Yayasan Pendidikan Nasrani, Badan Musyawarah Antar Gereja (BMAG), Pendidikan Hindu dan Budha Kota Tarakan, AMPI Kota Tarakan, Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM/BKM) untuk membiayai Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Kota Tarakan, Hibah Mahasiswa dalam rangka Program Pendidikan S1,S2, dan S3 Kota Tarakan, Tempat Rumah Ibadah (Gereja) se-Kota Tarakan, Kelompok Usaha Bersama (KUB) Kota Tarakan.
3. Alokasi Dana Hibah dan Bansos untuk Kelompok Masyarakat/Perorangan ditujukan kepada antara lain : Pemberian Tali Asih/Insentif bagi Pensiunan PNS (PWRI), LVRI, Warakawuri TNI-Polri Kota Tarakan, Petugas Tenaga Pendamping Daerah (TPHD), Tenaga Kesehatan Haji Daerah (TKHD), dan hadiah Ibadah Haji Kota Tarakan Tahun 2010, Pemberian tali asih guru-guru Sekolah Minggu se-Kota Tarakan, Panitia Pelaksana Indonesia Open Grandprix Gold 2010 Badminton Championship, Kelompok Pengrajin Kerupuk Udang Ni' Matullah, Kelompok Kesenian Reog Singo Bhudoyo, Kelompok Seni Campusari "Seno Laras",

Kelompok Tani Tambak dan Nelayan Bungi Raja Leta (BRL), Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK.PSM) Tarakan, Kelompok Pengrajin Perahu Gojeng Juata laut, Perkumpulan Modelling Kota Tarakan, Perkumpulan Talenta Prima Prestasi Tarakan, Hibah kepada Ahmad Syadali Mhs Hukum Universitas Borneo, Hibah kepada Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pamusian Kota Tarakan, Yayasan Mitra Lingkungan, KUB Nelayan Kanon Tengiri Raya Tarakan, Kelompok Tani Tunas Baru Mamburungan dan lain-lain.

4. Alokasi Bansos **Organisasi Kemasyarakatan** ditujukan kepada antara lain : Pembayaran Bansos kepada Gusti Rahmat untuk biaya transport berobat ke RSUD AWS Samarinda, Korban Kebakaran di jalan Sei Sembakung Mamburungan, Dewan Masjid Indonesia Kota Tarakan, Panitia Musyawarah Adat Dayak Lundayeh Kaltara, Bansos kepada Pengurus Asrama Mahasiswa Puteri (Mawari) Tarakan, Bansos kepada 50 orang mahasiswa S1 dalam rangka penyelesaian tugas akhir, Bansos kepada Panitia Hari Besar Nasional (PHBN) Kota Tarakan, pemberian Bansos kepada 53 mahasiswa Program D3 daam rangka penyelesaian Tugas Akhir, Pemberian Bansos kepada 65 mahasiswa S1 dalam rangka penyelesaian tugas akhir, Pemberian Bansos kepada Rumah sakit Daerah (RSUD) Kota Tarakan dalam rangka pembayaran klaim pasien rumah sakit Tahun 2010. Bansos kepada Keluarga Tongkonan Toraja (IKATT) Kota Tarakan, Bansos Kepada Himpunan ahli Rias Pengantin Indonesia (HARPI) Kota Tarakan, Bansos kepada Agus Susilawati dalam rangka biaya pendidikan Program S1 Sekola Tinggi Manajemen & Informatika Komputer (STMIK) Tarakan. Bansos kepada Panitia Pelaksana Perayaan Natal dalam rangka Perayaan Natal Umat Kristiani se-Kecamatan Tarakan Utara, Bansos kepada Dewi Yuliani dalam rangka membantu biaya pengobatan dan transport ke RSUD Surabaya atas nama Nasib Untung.
5. Alokasi Belanja Bantuan Parpol ditujuan kepada : Pemberian Bantuan kepada Partai Politik melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2010; Pemberian Bantuan kepada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka kekurangan dana bantuan kepada Partai Politik Tahun 2010.
6. Alokasi Belanja Tidak Terduga ditujukan kepada antara lain : Pemberian Bansos kepada Korban Musibah Tanah Longsor dalam rangka santunan korban musibah tanah longsor yang terletak di 9 (sembilan) Kelurahan Kota Tarakan; Pemberian Bansos kepada korban musibah tanah longsor dalam rangka santunan korban musibah tanah longsor yang terletak di 4 (empat) Kecamatan Kota Tarakan; Pengambilan Rapel Tambahan Penghasilan kepada Guru

PNS Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tarakan tahun 2009; Pemberian bantuan Tanggap Darurat kepada Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kota Tarakan dalam rangka Penyiapan Logistik Pengamanan dan Pengungsi Paska Kerusakan di Kota Tarakan tahun 2010 tahap pertama; Pemberian bantuan Tanggap Darurat kepada Tim Penanganan Paska Konflik di Kota Tarakan dalam rangka menanggulangi dampak paska konflik /kerusakan di Kota Tarakan tahun 2010.

B. Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala yang muncul, akibat adanya pengelolaan dana Hibah dan Bansos yaitu :

1. Dana Hibah dan Bansos yang dikucurkan Pemerintah Kota Tarakan Tidak Seluruhnya Dapat Terserap oleh masyarakat. Tingkat Keterserapan dana Hibah dan Bansos 3 (tiga) Tahun Terakhir adalah 66,91 % dan yang Tidak Terserap adalah 33,09%.
2. Administrasi usulan bantuan yang akan diajukan masih tergolong terlalu rumit.
3. Sumberdaya Manusia (SDM) responden masih relatif terbatas.
4. Peraturan / Juknis Pengelolaan Hibah dan Bansos selalu berubah-ubah.
5. Perencanaan Teknis Program Kegiatan belum ada, dan lokasi pembangunan tidak jelas/tumpang tindih /terkait masalah hukum.
6. Rekening Belanja sering tidak sesuai dengan RKB/RAB Proposal.
7. Kekecewaan dan rasa tidak bangga masyarakat terhadap penyaluran dana Hibah dan Bansos masih tinggi, karena menurut masyarakat responden ada indikasi hanya diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu atau dikenal dekat dengan kalangan eksekutif dan legislatif.
8. Terhadap pemberian Hibah dan Bansos yang tidak sesuai ketentuan, umumnya belum pernah diberikan sanksi yang tegas.
9. Ada indikasi pelaporan yang dibuat yayasan/ormas/organisasi profesi/kelompok masyarakat dan perorangan bersifat fiktif, karena bukti-bukti pencapaian hasil yang dilaporkan tidak sesuai dengan keadaan/kenyataan yang sebenarnya.

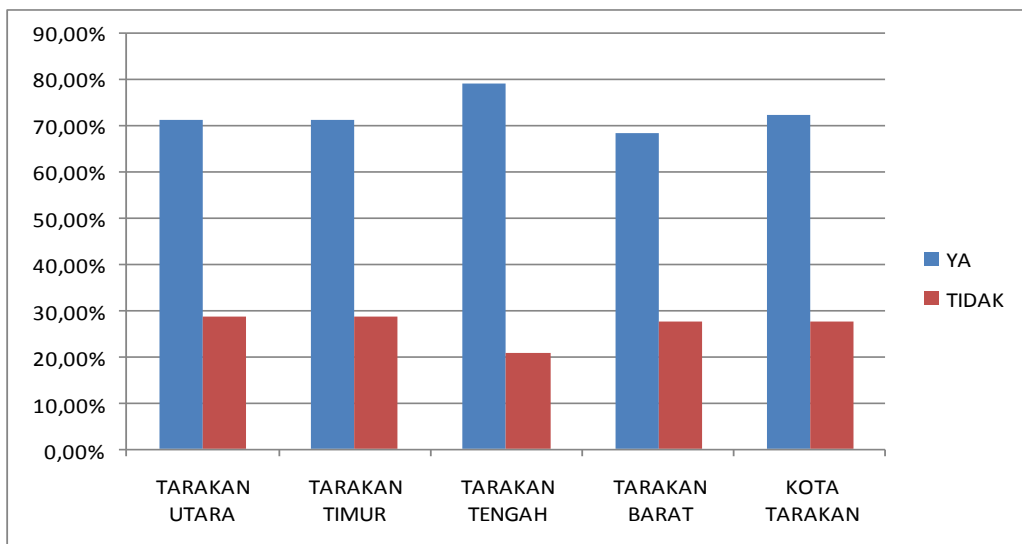
C. Faktor-faktor Pendorong

Faktor-faktor yang menjadi pendorong terlaksananya program/kegiatan akibat adanya alokasi dana Hibah dan Bansos :

1. Trend Bantuan Hibah dan Bansos selama 3 (tiga) tahun terakhir terus meningkat. Artinya tingkat Ketergantungan Masyarakat Responden terhadap Hibah dan Bansos Masih Tinggi.

2. Dana Hibah dan Bansos masih sangat Dibutuhkan oleh Masyarakat baik untuk kepentingan pembelian barang modal maupun kegiatan operasional organisasi, terutama untuk pengembangan dan perluasan usaha/kegiatan produktif masyarakat dan dana operasional Instansi Vertikal di daerah.
3. Tingkat Kerentanan Masyarakat Kota Tarakan terhadap gejolak perubahan Bidang ekonomi, sosial dan budaya kemasyarakatan masih tinggi, terutama untuk mengatasi keadaan-keadaan darurat dan bencana yang tak terduga.
4. Langkah prioritas yang menjadi acuan pengelolaan sudah menjadi kesadaran bersama terhadap Hibah dan Bansos, dalam rangka membangun Kemandirian Masyarakat, melalui Peningkatan Kapasitas Ekonomi lewat pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Ketahanan Sosial Budaya yang berkesinambungan.

D. Tingkat Persepsi Masyarakat



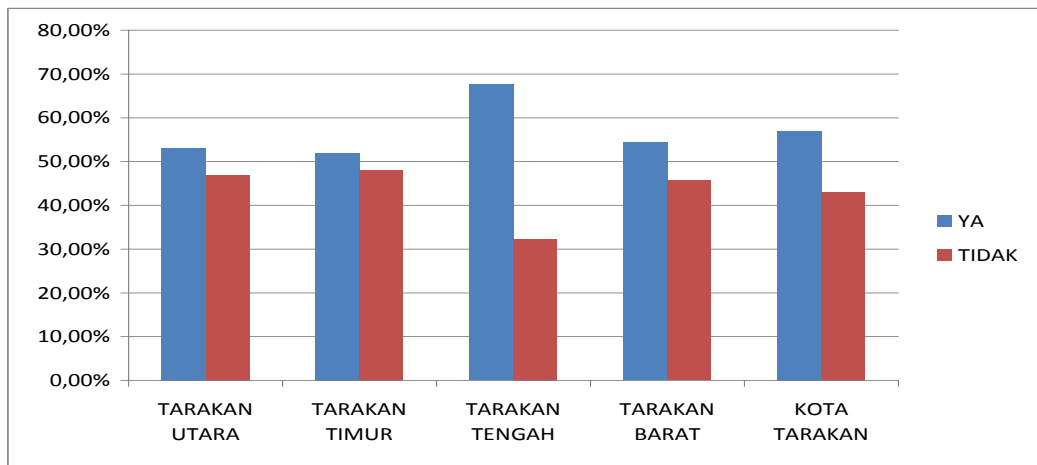
Gambar 1. Tingkat persepsi masyarakat responden terhadap pengelolaan dana Hibah dan Bansos Kota Tarakan

Tingkat persepsi masyarakat terhadap pengelolaan dana Hibah dan Bansos Kota Tarakan, dari total perhitungan indikator persepsi di masing-masing kecamatan seperti Tarakan Utara (71,21%) dan Tarakan Timur (71,30%), Tarakan Tengah (79,17%) dan Tarakan Barat (68,33%) kesemua kecamatan menunjukkan tingkat yang optimal. Dengan demikian secara keseluruhan untuk Kota Tarakan indikator persepsi sebesar 72,34% tergolong optimal dan hanya 27,66% tergolong tidak optimal.

Hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan dana Hibah dan Bansos selama ini sudah berjalan baik dan dianggap akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk mendukung kelestarian lingkungan dan penguatan kelembagaan masyarakat, disamping akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Kota Tarakan. Selain itu menurut masyarakat responden penyaluran dana Hibah dan Bansos tidak melulu bersifat stimulan, malah bersifat glondongan dan tidak selektif, bahkan mengikat pada sejumlah organisasi tertentu untuk mendapatkan bantuan terus-menerus, sehingga ada sekelompok masyarakat menganggap bahwa persepsi mereka terhadap pelaksanaan Hibah dan Bansos kurang/tidak optimal, karena tidak sejalan dengan prosedur yang telah ada, tetapi secara keseluruhan persepsi masyarakat yang ada di Kota Tarakan terhadap kegiatan Hibah dan Bansos berjalan optimal.

E. Tingkat Pencapaian Kemanfaatan/Keberhasilan Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos

Dari total perhitungan keseluruhan indikator didapatkan total pencapaian indikator kemanfaatan di masing-masing kecamatan seperti Tarakan Utara (53,05%), dan Tarakan Timur (51,91 %); Tarakan Tengah (67,66%) dan Tarakan Barat (54,33%) di semua kecamatan menunjukkan tingkat yang optimal. Dengan demikian secara keseluruhan untuk Kota Tarakan Indikator Total Pencapaian Kemanfaatan sebesar 56,97% tergolong optimal, dan hanya 43,03% tergolong tidak optimal.



Gambar 2. Tingkat pencapaian keberhasilan pengelolaan Hibah dan Bansos Kota Tarakan

Hal ini dapat dilihat dari total indikator total pencapaian kemanfaatan yang ada (Pengusulan, Persetujuan, Pencairan, Program Kegiatan dan Persepsi) menunjukkan indikator optimal, sedangkan indikator (Monitoring dan Evaluasi) menunjukkan belum/tidak optimal. Ini tidak

menutup kemungkinan setiap indikator yang ada dapat terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya dilapangan, karena setiap tahapan sangat rentan terjadi manipulasi pencapaian hasil, terutama bagaimana usulan yang dibuat dapat disetujui oleh instansi terkait dan dapat dipantau dan dinilai tingkat keberhasilannya, sehingga organisasi yang mengajukan usulan bantuan harus dinilai lebih teliti dan obyektif, agar organisasi yang mendapatkan bantuan adalah organisasi yang benar-benar harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dan aktif membina masyarakat sekitarnya dalam rangka melaksanakan pengelolaan Hibah dan Bansos, agar dapat dilaksanakan secara benar dan konsekwen. Artinya indikator total pencapaian kemanfaatan/keberhasilan di Kota Tarakan secara keseluruhan tergolong optimal, karena ada anggapan bahwa setiap ada bantuan, jika dikelola secara benar dan bertanggungjawab, akan mampu memberikan kemanfaatan optimal bagi masyarakat kota Tarakan, meskipun dalam pelaksanaannya disana-sini masih terjadi kekurangan dan harus dijadikan sebagai pokok perhatian kita, agar dimasa mendatang uang publik yang dikucurkan lewat APBD Kota Tarakan dapat dikelola lebih baik dan mampu meningkatkan kemandirian dan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan.

F. Strategi Pengelolaan Hibah dan Bansos

Strategi Pengelolaan Hibah dan Bansos yang dapat dilakukan agar dapat berjalan efektif dan efisien, antara lain :

1. **Arah Kebijakan Strategis** yang harus ditempuh menurut masyarakat responden terhadap pengelolaan Hibah dan Bansos, agar berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab. Ada beberapa arahan kebijakan strategis yang harus ditempuh dan dilaksanakan yaitu :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap semua penerima Hibah dan Bansos tanpa ada pilih kasih.
 - b. Melakukan pelaporan yang akuntabel, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Pemberian Hibah dan Bansos ditujukan untuk pengembangan partisipatif masyarakat lewat bidang-bidang yang tak tertangani SKPD terkait, misalnya penanganan kenakalan remaja, pencegahan penyebaran AIDS dan obat-obatan terlarang seperti Narkoba dan lain-lain.
 - d. Dilakukan verifikasi yang obyektif kepada semua penerima Hibah dan Bansos.
 - e. Hibah dan Bansos dapat diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang memiliki kegiatan rutin yang bermanfaat bagi masyarakat.

- f. Melakukan pembinaan administratif dan manajemen yang baik, agar usulan dan pelaporan yang dibuat sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) pengelolaan Hibah dan Bansos dan sedikit terjadi kesalahan.
 - g. Program kegiatan harus berpihak pada kebijakan yang pro rakyat.
 - h. Sebaiknya dana Hibah dan Bansos yang diterima masyarakat responden dapat dipantau oleh Kecamatan dan Kelurahan.
 - i. Seharusnya pemberian Hibah dan Bansos melibatkan Kecamatan dan Kelurahan dalam verifikasi awal.
 - j. Melaksanakan tugas operasional secara optimal, sesuai Visi dan Misi kedua SKPD pengelola Hibah dan Bansos yang ingin dicapai.
- 2. Arah kebijakan baru yang harus dilakukan ke depan**, menurut SKPD Terkait, agar alokasi dana Hibah Bansos berjalan efektif dan efisien, dan memberikan kemanfaatan optimal :
- a. Perwali/Perda harus menjadi acuan yuridis formal dan harus dilaksanakan secara optimal dan profesional.
 - b. Tim Monev Hibah dan Bansos seharusnya segera dibentuk dengan legalitas formal.
 - c. Peran CSR dalam membantu permasalahan kemasyarakatan terkait Hibah dan Bansos harus segera direalisasikan.
 - d. Sebaiknya dalam waktu dekat sudah ada Dokumen Rujukan bagi sasaran Hibah dan Bansos.
 - e. Mekanisme usulan sebaiknya berdasarkan pada hasil Musrembang dan Verifikasi Tim Gabungan.
 - f. Mekanisme Pembahasan dan Penerapan Kelayakan Proposal sebaiknya berdasarkan pada hasil pertimbangan obyektif oleh Tim SKPD Terpadu.
- 3. Kebijakan strategis** yang harus ditempuh agar pengelolaan Hibah dan Bansos dapat berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab, maka didapatkan beberapa kebijakan strategis, antara lain :
- a. Melakukan pengawasan terhadap semua penerima Hibah dan Bansos tanpa ada pilih kasih.
 - b. Melakukan pelaporan yang akuntabel, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Pemberian Hibah dan Bansos ditujukan untuk pengembangan partisipatif masyarakat lewat bidang-bidang yang tak tertangani SKPD terkait, misalnya penanganan kenakalan

remaja, pencegahan penyebaran AIDS dan obat-obatan terlarang seperti Narkoba dan lain-lain.

- d. Dilakukan verifikasi yang obyektif kepada semua penerima Hibah dan Bansos.
- e. Hibah dan Bansos dapat diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang memiliki kegiatan rutin yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama lebih diprioritaskan pada bidang-bidang penguatan ekonomi kerakyatan.
- f. Melakukan pembinaan administratif dan manajemen yang baik, agar usulan dan pelaporan yang dibuat sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) pengelolaan Hibah dan Bansos dan sedikit terjadi kesalahan.
- g. Program kegiatan Hibah dan Bansos harus berpihak pada kebijakan yang pro rakyat.
- h. Sebaiknya dana Hibah dan Bansos yang diterima masyarakat responden dapat dipantau oleh Kecamatan dan Kelurahan, terutama pelaporan dan pertanggungjawaban, mengingat Kecamatan dan Kelurahan merupakan SKPD Lingkup terdekat dengan penerima bantuan, agar koordinasi dan pengawasan lebih optimal.
- i. Seharusnya pemberian Hibah dan Bansos melibatkan Kecamatan dan Kelurahan dalam verifikasi awal, selama ini Kecamatan dan Kelurahan hanya dilibatkan dalam pembuatan Surat Keterangan Domisili, terutama untuk calon penerima Hibah dan Bansos, agar dapat dilakukan kajian yang lebih komprehensif bagi calon penerima, agar dana Hibah dan Bansos dapat diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan jauh dari konotasi fiktif.
- j. Melaksanakan Tugas Operasional secara optimal, sesuai Visi dan Misi kedua SKPD pengelola Hibah dan Bansos yang ingin dicapai.
- k. Perwali/Perda harus menjadi acuan yuridis formal dan harus dilaksanakan secara optimal dan profesional.
- l. Tim Monev Hibah dan Bansos seharusnya segera dibentuk dengan legalitas formal.
- m. Peran CSR dalam membantu permasalahan masyarakat terkait Hibah & Bansos harus segera direalisasikan.
- n. Sebaiknya dalam waktu dekat sudah ada Dokumen Rujukan bagi sasaran Hibah dan Bansos.
- o. Mekanisme Usulan sebaiknya berdasarkan pada hasil Musrembang dan Verifikasi Tim Gabungan.

- p. Mekanisme Pembahasan dan Penerapan Kelayakan Proposal sebaiknya berdasarkan pada hasil pertimbangan obyektif oleh Tim SKPD Terpadu.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, kompilasi, identifikasi dan analisis secara deskriptif dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Besarnya Anggaran yang dialokasikan untuk Dana Hibah dan Bansos Kota Tarakan 2010, adalah sebesar Rp.185.420.879.657,84 dengan realisasi anggaran yang dapat terserap sebesar Rp. 152.384.512.199,84,- atau 82,18%, dan Sisa Anggaran yang belum terserap adalah sebesar Rp 33.036.367.158,00,- atau sebesar 17,82% dari total anggaran. Alokasi anggaran digunakan untuk : Belanja Subsidi pada Perusahaan Daerah (Perusda); Alokasi Dana untuk Lembaga Pemerintah Pusat (Vertikal) di Daerah; Alokasi Dana untuk Badan/Organisasi Swasta; Alokasi Anggaran untuk Kelompok Masyarakat/Perorangan; Alokasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan; Alokasi Bantuan Parpol; Alokasi Belanja Tidak Terduga; dan Alokasi Pembiayaan Pemerintah Daerah.
2. Besaran Dana Hibah dan Bansos yang disalurkan 3 (tiga) tahun terakhir :
 - a. Tahun 2008 sebesar Rp. 159.131.789.443,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 108.306.764.790,- atau 68,06% dari Total Anggaran, dengan Sisa Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 50.825.024.653,- atau 31,94% dari Total Anggaran.
 - b. Tahun 2009 alokasi dana Hibah dan Bansos sebesar Rp. 175.663.578.535,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 87.406.750.749,- atau 49,76% dari Total Anggaran, dengan Sisa Anggaran yang tidak terserap Rp. 88.256.827.786,- atau 50,24% dari Total Anggaran.
 - c. Tahun 2010 besaran dana Hibah dan Bansos yang dialokasikan sebesar Rp. 185.420.879.657,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 152.384.512.499,- atau 82,18% dari Total Anggaran, dengan Sisa Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 33.036.367.158,- atau 17,82% dari Total Anggaran.
3. Kelompok sasaran yang mendapatkan dana Hibah dan Bansos adalah : Instansi Vertikal yang ada di Daerah; Badan/Lembaga/Organisasi Swasta; Kelompok Masyarakat/Perorangan; Organisasi Kemasyarakatan; Bantuan Partai Politik (Parpol) dan Belanja Tidak Tetap.

4. Faktor-faktor yang menjadi Permasalahan dan Kendala terhadap pengelolaan Dana Hibah dan Bansos Kota Tarakan adalah : (a) dana yang dikucurkan tidak seluruhnya dapat terserap oleh masyarakat; (b) administrasi usulan masih tergolong terlalu rumit; (c) SDM responden masih relatif terbatas; (d) peraturan/juknis yang selalu berubah-ubah; (e) perencanaan teknis program kegiatan belum ada, dan lokasi pembangunan tidak jelas/tumpang tindih /terkait masalah hukum; (f) rekening belanja sering tidak sesuai dengan RKB/RAB proposal; (g) kekecewaan dan rasa tidak bangga masyarakat terhadap penyaluran dana masih tinggi; (h) pemberian Hibah dan Bansos yang tidak sesuai ketentuan, umumnya belum pernah diberikan sanksi yang tegas; dan (j) ada indikasi pelaporan yang dibuat yayasan/ormas/organisasi profesi/kelompok masyarakat dan perorangan bersifat fiktif.
5. Faktor-faktor yang menjadi pendorong terlaksananya pengelolaan Hibah dan Bansos, antara lain : (a) trend Bantuan Hibah dan Bansos selama 3 (tiga) tahun terakhir terus meningkat; (b) dana Hibah dan Bansos masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat responden; (c) tingkat kerentanan Masyarakat Kota masih tinggi, terutama untuk mengatasi keadaan-keadaan darurat dan bencana yang tak terduga; (d) langkah prioritas yang menjadi acuan pengelolaan sudah menjadi kesadaran bersama terhadap Hibah dan Bansos, dalam rangka membangun kemandirian masyarakat.
6. Tingkat persepsi masyarakat terhadap pengelolaan dana Hibah dan Bansos di masing-masing kecamatan seperti Tarakan Utara (71,21%); dan Tarakan Timur (71,30%); Tarakan Tengah (79,17%) dan Tarakan Barat (68,33%). Indikator Persepsi masyarakat responden terhadap pengelolaan Hibah dan Bansos sebesar 72,34% tergolong optimal, dan hanya 27,66% tergolong tidak optimal.
7. Tingkat pencapaian keberhasilan pengelolaan dana Hibah dan Bansos, didapatkan total pencapaian indikator kemanfaatan di masing-masing kecamatan seperti Tarakan Utara (53,05%); dan Tarakan Timur (51,91%); Tarakan Tengah (67,66%) dan Tarakan Barat (54,33%). Indikator total pencapaian kemanfaatan sebesar 56,97% tergolong optimal, dan hanya 43,03% tergolong tidak optimal.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian ada beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Segera bentuk TIM Monev Hibah dan Bansos dengan Legalitas Formal.
2. Sebaiknya pemberian Hibah dan Bansos ditujukan pada Pengembangan Partisipatif Masyarakat, lewat organisasi kemasyarakatan yang memiliki kegiatan rutin yang bermanfaat, serta lebih terfokus pada bidang-bidang kegiatan pembangunan yang pro rakyat.
3. Segera lakukan Pembinaan Administratif dan Manajemen terhadap semua penerima Hibah dan Bansos.
4. Sebaiknya mekanisme Pembahasan dan Penerapan Kelayakan Proposal juga mengacu pada hasil pertimbangan obyektif oleh Tim SKPD Terpadu.
5. Sebaiknya melibatkan Kecamatan dan Kelurahan dalam Verifikasi Awal dan Pemantauan.
6. Segera Libatkan Pengusaha dan Perusahaan di Kota Tarakan, lewat peran CSR dalam membantu permasalahan kemasyarakatan terkait Hibah dan Bansos .
7. Sebaiknya dalam waktu dekat sudah ada Dokumen Rujukan bagi Sasaran Hibah dan Bansos;
8. Dianjurkan Perda/Perwali harus menjadi Acuan Yuridis Formal dan harus dilaksanakan secara optimal dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2011. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tarakan. 78 hlm.
- Anonim, 2011. Laporan Tahunan Kinerja Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kota Tarakan. 53 hlm.
- Anonim, 2011. Laporan Tahunan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan. 62 hlm.
- Adi Isbandi R, 1994. Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial : Dasar-dasar Pemikiran. Rajawali Press. Jakarta. 239 hlm.
- MacPherson Stewart, 1987. Kebijakan Sosial di Dunia Ketiga : Dilema Sosial Keterbelakangan. Aksara Persada Indonesia. Jakarta. 261 hlm.
- Mikkelsen Britha, 1999. Metode Penelitian Partisipatori dan Upaya-Upaya Pemberdayaan : Sebuah Buku Pegangan bagi Praktisi Lapangan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 438 hlm.

Padangaran, Ayub M. 2011. Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat ; Konsep, Teori dan Aplikasi. Unhalu Press. Kendari. 273 hlm

Slamet, Y. 1994. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Universitas Sebelas Maret Press. Surakarta. 187 hlm.

Suparlan Parsudi, 1995. Kemiskinan di Perkotaan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 220 hlm.

Sayogyo. 1998. Dimensi Kemiskinan (Agenda Pemikiran Sayogyo). Pusat P3R-YAE. 117 hlm.

Sulaiman Munandar, 1998. Dinamika Masyarakat Transisi; Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perubahan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 195 hlm.